

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Amiyati Fitriah, 2014, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Memberikan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Atas Tanah Dinjau Dari Pasal 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan kedua belas*, Djambatan, Jakarta.
- J.j.j.m, Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, FE UI, Jakarta.
- Koeswahyono, Imam, 2010, *Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Edisi Cet.2*, Alumni, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadyah Surakarta Press University, Solo
- Santoso, Urip, 2010, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Sarjita, Sudjito, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqoni, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suteki, Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

W. Kusumah, Mulyana, 1998, *Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Winarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Zainuddin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

C. Jurnal, Tesis, dan Internet

A.M. Mujahidin. (2007). Hukum Progresif, Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia. *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257*.

Andawan, Asyer. (2017). Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Administratum Vol. 5 No. 2*.

Bahfein, Suhaiela. 2020. 54 Proyek Tol dan Jembatan Masuk Daftar PSN. <https://www.kompas.com/properti/read/2020/11/28/141006321/54-proyek-tol-dan-jembatan-masuk-daftar-psn>.

Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2021. Konstruksi "Sea Dike" pada Tol Semarang – Demak. [https://bpjt.pu.go.id/berita/konstruksi-sea-dike-pada-tol-semarang-demak#:~:text=Sementara%20Seksi%20%20\(Sayung%20%2D%20Demak,sekitar%20Rp%2015%2C3%20triliun](https://bpjt.pu.go.id/berita/konstruksi-sea-dike-pada-tol-semarang-demak#:~:text=Sementara%20Seksi%20%20(Sayung%20%2D%20Demak,sekitar%20Rp%2015%2C3%20triliun).

Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. Berita: Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Semakin Lengkapi Konektivitas Utara Pulau Jawa. <https://bpjt.pu.go.id/berita/pembangunan-jalan-tol-semarang-demak-semakin-lengkapi-konektivitas-utara-pulau-jawa>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. (2022). Laporan Kecamatan Sayung Dalam Angka 2022.

Candra, Diki Mareta, Luthy Yustika. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pembebasan Tanah Yang Terkena Pengadaan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Perkara No.593/Pdt.G/2018/Pn.Tng Tertanggal 12 September 2018). *JCA of Law Universitas Esa Unggul Jakarta Vol. 1 No. 1*.

Deltares. (2019), Risk Assessment North Coast Java, tersedia pada: <https://indonesia.wetlands.org/id/download/3882/>.

Gandara, Moh. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99*.

Harruma, Issha. 2022. Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. 2021. Profil Proyek Jalan Tol Semarang-Demak. <http://simpulkpbu.pu.go.id/project/read/121/jalan-tol-semarang-demak-yang-terintegrasi-tanggul-laut-kota-semarang>.

Kementerian PUPR. 2023. Berita: Tanggul Laut Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 1 Sepanjang 10,64 Km Upaya Atasi Banjir Rob di Kabupaten Demak. <https://pu.go.id/berita/tanggul-laut-pada-pembangunan-jalan-tol-semarang-demak-seksi-1-sepanjang-1064-km-upaya-atasi-banjir-rob-di-kabupaten-demak>.

- Koeswahyono, I. (2008). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi*, Vol 1, No. 1.
- Lestari, Putri. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum* Vol 1, no. 2.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1).
- Mahfud MD, Moh (e.t.al), (2011), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif - Urgensi dan Kritik, *Jakarta : Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa*.
- Muliawan, Jarot Widya. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition. *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2.
- Nuryadi, Deni. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Universitas Singaperbangsa Karawang*.
- Rahadiano, Reza. Tesis: Kajian Kinerja (P2t) Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol (Studi Kasus: P2t Kabupaten Demak Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak). Magister Managemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1 No. 1.
- Rahmanda, Bagus. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah Akibat Bencana Alam Dan Kaitannya Dengan Pihak Ketiga. *Gema Keadilan* Vol. 6 Edisi 1.
- Raihan A.G., Harvesta A.J. (2020). Laporan Kerja Praktek: Proyek Jalan Tol Semarang Demak PT PP (Persero), Tbk, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh November.
- Ramadhan, Tri Cahya, (2018), Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tanahnya Musnah Akibat Bencana Alam Abrasi, *Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember..*
- Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah. (2022). Demak: Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Rongiyati, Sulasi. (2012). Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Negara Hukum: Vol. 3, No. 1*.

Suong, M. A. (2021). Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Positif Nasional. *Jurnal Media Hukum*, 9(1).

Yuliantiningsih, Aryuni.(2010). Penerapan Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan* dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1.